



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/Permentan/SR.310/3/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 69/Permentan/SR.310/12/2016 TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu dilakukan penambahan alokasi Pupuk Bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pernakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);
 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);
 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5948);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
22. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2011 Nomor 491);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
30. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

Memperhatikan : Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 19 Januari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 69/PERMENTAN/SR.310/12/2016 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017.

PASAL I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 dan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

13. Satuan Kerja Provinsi adalah satuan kerja yang membidangi diantaranya urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan Provinsi.

14. Satuan Kerja Kabupaten/Kota adalah satuan kerja yang membidangi diantaranya urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun-tahun sebelumnya serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 9.550.000 ton termasuk di dalamnya alokasi cadangan pupuk bersubsidi sebanyak 1.000.000 ton.
- (3) Penyaluran terhadap alokasi cadangan Pupuk Bersubsidi sebanyak 1.000.000 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan cadangan Pupuk Bersubsidi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2017.
- (4) Rincian Alokasi Pupuk Bersubsidi menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 04/Permentan/SR.310/3/2017

Tanggal : 3 Maret 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2017
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)									
		UREA		SP-36		ZA		NPK		ORGANIK	
		ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	66.400	6.430	20.743	857	10.677	1.493	42.100	6.370	14.200	-
2	SUMATERA UTARA	151.100	2.625	45.165	5.465	49.319	256	110.500	13.310	29.350	-
3	SUMATERA BARAT	65.600	-	25.274	5.076	15.588	-	50.300	9.700	14.820	-
4	J A M B I	25.300	3.250	17.993	-	7.739	-	41.600	7.120	5.810	343
5	R I A U	30.990	3.260	12.793	-	9.798	1.552	43.300	4.520	8.000	-
6	BENGKULU	19.600	-	7.692	-	4.568	-	28.600	710	4.800	650
7	SUMATERA SELATAN	139.860	-	40.565	3.830	5.879	-	87.400	6.830	15.280	-
8	BANGKA BELITUNG	16.400	3.790	3.752	-	2.044	941	16.800	1.300	4.830	1.110
9	LAMPUNG	228.500	14.020	42.635	965	17.961	-	129.500	30.620	26.400	-
10	KEP. RIAU	50	35	14	6	9	-	120	120	20	14
11	DKI. JAKARTA	150	-	48	-	10	-	55	-	100	-
12	BANTEN	56.300	13.150	19.560	1.030	1.500	-	22.900	5.100	6.800	-
13	JAWA BARAT	484.390	97.230	143.262	13.368	67.214	686	279.400	65.000	49.000	-
14	D.I. YOGYAKARTA	37.790	4.625	3.490	70	9.532	183	21.500	2.980	12.400	-
15	JAWA TENGAH	737.100	86.750	151.590	15.370	209.603	7.407	364.700	40.100	237.860	-
16	JAWA TIMUR	973.901	123.469	154.557	693	474.223	29.772	522.600	74.705	356.040	101.990
17	B A L I	38.280	1.510	1.880	-	6.280	-	20.400	2.950	21.100	-
18	KALIMANTAN BARAT	31.499	-	12.605	-	3.580	-	73.800	14.700	19.690	-
19	KALIMANTAN TENGAH	14.890	541	4.215	-	1.440	-	29.200	7.760	2.850	-
20	KALIMANTAN SELATAN	33.800	875	7.170	-	1.530	-	33.800	3.345	5.450	-
21	KALIMANTAN TIMUR	15.900	-	4.780	-	2.410	-	24.800	2.120	1.470	-

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 04/Permentan/SR.310/3/2017

Tanggal: 3 Maret 2017

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2017
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI**

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)									
		UREA		SP-36		ZA		NPK		ORGANIK	
		ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
22	KALIMANTAN UTARA	1.010	160	105	45	105	-	2.077	333	388	-
23	SULAWESI UTARA	16.860	900	3.895	-	505	-	11.400	635	1.650	-
24	GORONTALO	18.600	5.520	1.275	-	625	-	15.000	6.080	960	-
25	SULAWESI TENGAH	27.860	1.930	3.345	-	8.605	-	26.100	2.400	4.630	-
26	SULAWESI TENGGARA	18.380	1.220	6.970	-	3.960	-	13.300	5.290	5.000	605
27	SULAWESI SELATAN	241.870	39.420	38.280	2.210	60.200	7.075	92.880	36.900	24.170	-
28	SULAWESI BARAT	22.500	350	2.078	-	6.760	250	15.850	7.460	1.180	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	125.000	18.260	16.260	1.000	14.310	385	38.650	7.240	12.220	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	21.300	-	5.054	-	2.920	-	13.600	270	5.380	-
31	MALUKU	2.300	-	190	15	146	-	2.400	-	550	-
32	PAPUA	5.700	-	2.415	-	540	-	6.000	-	1.990	-
33	MALUKU UTARA	500	-	115	-	270	-	1.500	-	720	-
34	PAPUA BARAT	1.000	-	235	-	150	-	1.900	-	180	-
JUMLAH		3.670.680	429.320	800.000	50.000	1.000.000	50.000	2.184.032	365.968	895.288	104.712
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN		4.100.000		850.000		1.050.000		2.550.000		1.000.000	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2017



Lampiran II. Peraturan Menteri Pertanian
 Nomor : 04/Permentan/SR.310/3/2017
 Tanggal: 3 Maret 2017

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2017 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN	
		ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
UREA	4.100.000	387.262	-	297.611	-	300.763	-	322.585	-	328.278	-	289.135	-
SP-36	850.000	116.585	-	65.443	-	81.780	-	86.066	-	74.386	-	56.237	-
ZA	1.050.000	122.816	-	80.223	-	94.405	-	85.194	-	81.378	-	83.724	-
NPK	2.550.000	241.651	-	177.254	-	215.327	-	217.703	-	203.636	-	174.722	-
ORGANIK	1.000.000	74.487	-	60.191	-	95.655	-	93.856	-	83.866	-	70.388	-
JUMLAH	9.550.000	942.801	-	680.722	-	787.930	-	805.404	-	771.544	-	674.206	-
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN		942.801		680.722		787.930		805.404		771.544		674.206	

(Ton)

JENIS PUPUK	JUL		AGS		SEPT		OKT		NOP		DES	
	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
UREA	194.806	-	218.723	76.523	206.862	41.991	242.537	73.335	377.225	99.084	504.893	138.387
SP-36	34.399	-	40.187	11.032	46.289	5.197	47.899	10.408	75.739	11.343	74.990	12.020
ZA	48.859	-	66.232	11.220	68.470	5.320	67.100	10.114	102.413	11.157	99.186	12.189
NPK	110.496	-	131.360	76.666	138.239	45.891	138.342	75.154	219.218	85.180	216.084	83.077
ORGANIK	43.730	-	61.028	20.696	65.073	11.038	64.905	23.769	95.049	25.690	87.060	23.519
JUMLAH	432.290	-	517.530	196.137	524.933	109.437	560.783	192.780	869.644	232.454	982.213	269.192
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN	432.290		713.667		634.370		753.563		1.102.098		1.251.405	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 3 Maret 2017
 MENTERI PERTANIAN,

 AMRAN SULAIMAN



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN	
			ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	72.830	7.005	-	5.384	-	5.441	-	5.835	-	5.938	-	5.230	-
2	SUMATERA UTARA	153.725	15.941	-	12.251	-	12.381	-	13.279	-	13.513	-	11.902	-
3	SUMATERA BARAT	65.600	6.921	-	5.319	-	5.375	-	5.765	-	5.867	-	5.167	-
4	J A M B I	28.550	2.669	-	2.051	-	2.073	-	2.223	-	2.263	-	1.993	-
5	R I A U	34.250	3.269	-	2.513	-	2.539	-	2.723	-	2.772	-	2.441	-
6	BENGKULU	19.600	2.068	-	1.589	-	1.606	-	1.723	-	1.753	-	1.544	-
7	SUMATERA SELATAN	139.860	14.755	-	11.340	-	11.460	-	12.291	-	12.508	-	11.017	-
8	BANGKA BELITUNG	20.190	1.730	-	1.330	-	1.344	-	1.441	-	1.467	-	1.292	-
9	LAMPUNG	242.520	24.107	-	18.526	-	18.723	-	20.081	-	20.435	-	17.999	-
10	KEP. RIAU	85	5	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
11	DKI. JAKARTA	150	16	-	12	-	12	-	13	-	13	-	12	-
12	BANTEN	69.450	5.940	-	4.565	-	4.613	-	4.948	-	5.035	-	4.435	-
13	JAWA BARAT	581.620	51.104	-	39.273	-	39.689	-	42.569	-	43.320	-	38.155	-
14	D.I. YOGYAKARTA	42.415	3.987	-	3.064	-	3.096	-	3.321	-	3.380	-	2.977	-
15	JAWA TENGAH	823.850	77.765	-	59.762	-	60.395	-	64.778	-	65.921	-	58.060	-
16	JAWA TIMUR	1.097.370	102.748	-	78.962	-	79.798	-	85.589	-	87.098	-	76.713	-
17	B A L I	39.790	4.039	-	3.104	-	3.137	-	3.364	-	3.423	-	3.015	-
18	KALIMANTAN BARAT	31.499	3.323	-	2.554	-	2.581	-	2.768	-	2.817	-	2.481	-
19	KALIMANTAN TENGAH	15.431	1.571	-	1.207	-	1.220	-	1.309	-	1.332	-	1.173	-
20	KALIMANTAN SELATAN	34.675	3.566	-	2.740	-	2.769	-	2.970	-	3.023	-	2.662	-
21	KALIMANTAN TIMUR	15.900	1.677	-	1.289	-	1.303	-	1.397	-	1.422	-	1.252	-
22	KALIMANTAN UTARA	1.170	107	-	82	-	83	-	89	-	90	-	80	-
23	SULAWESI UTARA	17.760	1.779	-	1.367	-	1.381	-	1.482	-	1.508	-	1.328	-
24	GORONTALO	24.120	1.962	-	1.508	-	1.524	-	1.635	-	1.663	-	1.465	-
25	SULAWESI TENGAH	29.790	2.939	-	2.259	-	2.283	-	2.448	-	2.492	-	2.194	-
26	SULAWESI TENGGARA	19.600	1.939	-	1.490	-	1.506	-	1.615	-	1.644	-	1.448	-
27	SULAWESI SELATAN	281.290	25.518	-	19.610	-	19.818	-	21.256	-	21.631	-	19.052	-
28	SULAWESI BARAT	22.850	2.374	-	1.824	-	1.844	-	1.977	-	2.012	-	1.772	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	143.260	13.188	-	10.135	-	10.242	-	10.985	-	11.179	-	9.846	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	21.300	2.247	-	1.727	-	1.745	-	1.872	-	1.905	-	1.678	-
31	MALUKU	2.300	243	-	186	-	188	-	202	-	206	-	181	-
32	PAPUA	5.700	601	-	462	-	467	-	501	-	510	-	449	-
33	MALUKU UTARA	500	53	-	41	-	41	-	44	-	45	-	39	-
34	PAPUA BARAT	1.000	106	-	81	-	82	-	88	-	89	-	79	-
JUMLAH		4.100.000	387.262	-	297.611	-	300.763	-	322.585	-	328.278	-	289.135	-
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN			387.262		297.611		300.763		322.585		328.278		289.135	

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES	
		ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	3.524	-	3.957	1.146	3.742	629	4.387	1.098	6.824	1.484	9.133	2.073
2	SUMATERA UTARA	8.019	-	9.003	468	8.515	257	9.984	448	15.528	606	20.784	846
3	SUMATERA BARAT	3.481	-	3.909	-	3.697	-	4.334	-	6.742	-	9.023	-
4	J A M B I	1.343	-	1.508	579	1.426	318	1.672	555	2.600	750	3.479	1.048
5	R I A U	1.645	-	1.847	581	1.746	319	2.048	557	3.185	752	4.262	1.051
6	BENGKULU	1.040	-	1.168	-	1.105	-	1.295	-	2.014	-	2.695	-
7	SUMATERA SELATAN	7.422	-	8.334	-	7.882	-	9.241	-	14.373	-	19.237	-
8	BANGKA BELITUNG	870	-	977	676	924	371	1.084	647	1.685	875	2.256	1.221
9	LAMPUNG	12.127	-	13.615	2.499	12.877	1.371	15.098	2.395	23.482	3.236	31.430	4.519
10	KEP. RIAU	3	-	3	6	3	3	3	6	5	8	8	12
11	DKI. JAKARTA	8	-	9	-	8	-	10	-	15	-	22	-
12	BANTEN	2.988	-	3.355	2.344	3.173	1.286	3.720	2.246	5.786	3.035	7.742	4.239
13	JAWA BARAT	25.707	-	28.863	17.331	27.298	9.510	32.006	16.609	49.779	22.440	66.627	31.340
14	D.I. YOGYAKARTA	2.006	-	2.252	824	2.130	452	2.497	790	3.884	1.067	5.196	1.492
15	JAWA TENGAH	39.118	-	43.921	15.463	41.540	8.485	48.703	14.819	75.750	20.021	101.387	27.962
16	JAWA TIMUR	51.685	-	58.031	22.008	54.885	12.076	64.350	21.091	100.085	28.496	133.957	39.798
17	B A L I	2.032	-	2.281	269	2.157	148	2.529	258	3.934	348	5.265	487
18	KALIMANTAN BARAT	1.672	-	1.877	-	1.775	-	2.081	-	3.237	-	4.333	-
19	KALIMANTAN TENGAH	790	-	887	96	839	53	984	92	1.530	125	2.048	175
20	KALIMANTAN SELATAN	1.794	-	2.014	156	1.905	86	2.233	149	3.474	202	4.650	282
21	KALIMANTAN TIMUR	844	-	947	-	896	-	1.051	-	1.634	-	2.188	-
22	KALIMANTAN UTARA	54	-	60	29	57	16	67	27	104	37	137	51
23	SULAWESI UTARA	895	-	1.005	160	950	88	1.114	154	1.733	208	2.318	290
24	GORONTALO	987	-	1.108	984	1.048	540	1.229	943	1.911	1.274	2.560	1.779
25	SULAWESI TENGAH	1.479	-	1.660	344	1.570	189	1.841	330	2.863	445	3.832	622
26	SULAWESI TENGGARA	975	-	1.095	217	1.036	119	1.214	208	1.889	282	2.529	394
27	SULAWESI SELATAN	12.836	-	14.412	7.026	13.631	3.855	15.981	6.734	24.856	9.098	33.269	12.707
28	SULAWESI BARAT	1.194	-	1.341	62	1.268	34	1.487	60	2.312	81	3.095	113
29	NUSA TENGGARA BARAT	6.634	-	7.448	3.255	7.044	1.786	8.259	3.119	12.846	4.214	17.194	5.886
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1.130	-	1.269	-	1.200	-	1.407	-	2.189	-	2.931	-
31	MALUKU	122	-	137	-	130	-	152	-	236	-	317	-
32	PAPUA	302	-	340	-	321	-	377	-	586	-	784	-
33	MALUKU UTARA	27	-	30	-	28	-	33	-	51	-	68	-
34	PAPUA BARAT	53	-	60	-	56	-	66	-	103	-	137	-
JUMLAH		194.806	-	218.723	76.523	206.862	41.991	242.537	73.335	377.225	99.084	504.893	138.387
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN		194.806		295.246		248.853		315.872		476.309		643.280	

ALOKASI PUPUK SP36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN	
			ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	21.600	3.023	-	1.697	-	2.120	-	2.232	-	1.929	-	1.458	-
2	SUMATERA UTARA	50.630	6.582	-	3.695	-	4.617	-	4.859	-	4.199	-	3.175	-
3	SUMATERA BARAT	30.350	3.683	-	2.067	-	2.584	-	2.719	-	2.350	-	1.777	-
4	J A M B I	17.993	2.622	-	1.472	-	1.839	-	1.936	-	1.673	-	1.265	-
5	R I A U	12.793	1.864	-	1.047	-	1.308	-	1.376	-	1.189	-	899	-
6	BENGKULU	7.692	1.121	-	629	-	786	-	828	-	715	-	541	-
7	SUMATERA SELATAN	44.395	5.912	-	3.318	-	4.147	-	4.364	-	3.772	-	2.852	-
8	BANGKA BELITUNG	3.752	547	-	307	-	384	-	404	-	349	-	264	-
9	LAMPUNG	43.600	6.213	-	3.488	-	4.358	-	4.587	-	3.964	-	2.997	-
10	KEP. RIAU	20	2	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-
11	DKI. JAKARTA	48	7	-	4	-	5	-	5	-	4	-	3	-
12	BANTEN	20.590	2.850	-	1.600	-	2.000	-	2.104	-	1.819	-	1.375	-
13	JAWA BARAT	156.630	20.877	-	11.719	-	14.645	-	15.413	-	13.321	-	10.071	-
14	D.I. YOGYAKARTA	3.560	509	-	285	-	357	-	375	-	325	-	245	-
15	JAWA TENGAH	166.960	22.091	-	12.401	-	15.496	-	16.309	-	14.095	-	10.656	-
16	JAWA TIMUR	155.250	22.523	-	12.643	-	15.799	-	16.628	-	14.371	-	10.865	-
17	B A L I	1.880	274	-	154	-	192	-	202	-	175	-	132	-
18	KALIMANTAN BARAT	12.605	1.837	-	1.031	-	1.289	-	1.356	-	1.172	-	886	-
19	KALIMANTAN TENGAH	4.215	614	-	345	-	431	-	453	-	392	-	296	-
20	KALIMANTAN SELATAN	7.170	1.045	-	587	-	733	-	771	-	667	-	504	-
21	KALIMANTAN TIMUR	4.780	697	-	391	-	489	-	514	-	444	-	336	-
22	KALIMANTAN UTARA	150	15	-	9	-	11	-	11	-	10	-	7	-
23	SULAWESI UTARA	3.895	568	-	319	-	398	-	419	-	362	-	274	-
24	GORONTALO	1.275	186	-	104	-	130	-	137	-	119	-	90	-
25	SULAWESI TENGAH	3.345	487	-	274	-	342	-	360	-	311	-	235	-
26	SULAWESI TENGGARA	6.970	1.016	-	570	-	713	-	750	-	648	-	490	-
27	SULAWESI SELATAN	40.490	5.579	-	3.131	-	3.913	-	4.118	-	3.559	-	2.691	-
28	SULAWESI BARAT	2.078	303	-	170	-	212	-	224	-	193	-	146	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	17.260	2.370	-	1.330	-	1.662	-	1.749	-	1.512	-	1.143	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	5.054	737	-	413	-	517	-	544	-	470	-	355	-
31	MALUKU	205	28	-	16	-	19	-	20	-	18	-	13	-
32	PAPUA	2.415	352	-	198	-	247	-	260	-	225	-	170	-
33	MALUKU UTARA	115	17	-	9	-	12	-	12	-	11	-	8	-
34	PAPUA BARAT	235	34	-	19	-	24	-	25	-	22	-	17	-
JUMLAH		850.000	116.585	-	65.443	-	81.780	-	86.066	-	74.386	-	56.237	-
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN			116.585		65.443		81.780		86.066		74.386		56.237	

Nomor : 04/Pementan/SR.310/3/2017
Tanggal : 3 Maret 2017

ALOKASI PUPUK SP36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES	
		ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	892	-	1.042	189	1.200	89	1.242	178	1.964	194	1.944	207
2	SUMATERA UTARA	1.942	-	2.269	1.206	2.613	568	2.704	1.138	4.276	1.240	4.234	1.313
3	SUMATERA BARAT	1.087	-	1.270	1.120	1.462	528	1.513	1.057	2.393	1.152	2.369	1.219
4	J A M B I	774	-	904	-	1.041	-	1.077	-	1.703	-	1.687	-
5	R I A U	550	-	643	-	740	-	766	-	1.211	-	1.200	-
6	BENGKULU	331	-	386	-	445	-	461	-	728	-	721	-
7	SUMATERA SELATAN	1.744	-	2.038	845	2.347	398	2.429	797	3.840	869	3.802	921
8	BANGKA BELITUNG	161	-	188	-	217	-	225	-	355	-	351	-
9	LAMPUNG	1.833	-	2.142	213	2.467	100	2.553	201	4.036	219	3.997	232
10	KEP. RIAU	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
11	DKI. JAKARTA	2	-	2	-	3	-	3	-	5	-	5	-
12	BANTEN	841	-	983	227	1.132	107	1.171	214	1.852	234	1.833	248
13	JAWA BARAT	6.160	-	7.196	2.950	8.289	1.389	8.578	2.783	13.563	3.033	13.430	3.213
14	D.I. YOGYAKARTA	150	-	175	15	202	7	209	15	330	16	328	17
15	JAWA TENGAH	6.518	-	7.615	3.391	8.771	1.597	9.076	3.200	14.352	3.487	14.210	3.695
16	JAWA TIMUR	6.646	-	7.764	153	8.943	72	9.254	144	14.633	157	14.488	167
17	B A L I	81	-	94	-	109	-	113	-	178	-	176	-
18	KALIMANTAN BARAT	542	-	633	-	729	-	755	-	1.193	-	1.182	-
19	KALIMANTAN TENGAH	181	-	212	-	244	-	252	-	399	-	396	-
20	KALIMANTAN SELATAN	308	-	360	-	415	-	429	-	679	-	672	-
21	KALIMANTAN TIMUR	206	-	240	-	277	-	286	-	453	-	447	-
22	KALIMANTAN UTARA	5	-	5	10	6	5	6	9	10	10	10	11
23	SULAWESI UTARA	167	-	196	-	225	-	233	-	369	-	365	-
24	GORONTALO	55	-	64	-	74	-	76	-	121	-	119	-
25	SULAWESI TENGAH	144	-	168	-	194	-	200	-	317	-	313	-
26	SULAWESI TENGGARA	300	-	350	-	403	-	417	-	660	-	653	-
27	SULAWESI SELATAN	1.646	-	1.923	488	2.215	230	2.292	460	3.624	501	3.589	531
28	SULAWESI BARAT	89	-	104	-	120	-	124	-	197	-	196	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	699	-	817	221	941	104	974	208	1.539	227	1.524	240
30	NUSA TENGGARA TIMUR	217	-	254	-	292	-	303	-	478	-	474	-
31	MALUKU	8	-	10	3	11	2	11	3	18	3	18	-
32	PAPUA	104	-	121	-	140	-	145	-	229	-	224	-
33	MALUKU UTARA	5	-	6	-	7	-	7	-	11	-	10	-
34	PAPUA BARAT	10	-	12	-	14	-	14	-	22	-	22	-
JUMLAH		34.399	-	40.187	11.032	46.289	5.197	47.899	10.408	75.739	11.343	74.990	12.020
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN		34.399		51.219		51.486		58.307		87.082		87.010	

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN	
			ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	12.170	1.311	-	857	-	1.008	-	910	-	869	-	894	-
2	SUMATERA UTARA	49.575	6.057	-	3.957	-	4.656	-	4.202	-	4.013	-	4.129	-
3	SUMATERA BARAT	15.588	1.914	-	1.250	-	1.472	-	1.328	-	1.268	-	1.305	-
4	J A M B I	7.739	950	-	621	-	731	-	659	-	630	-	648	-
5	R I A U	11.350	1.203	-	786	-	925	-	835	-	797	-	820	-
6	BENGKULU	4.568	561	-	366	-	431	-	389	-	372	-	382	-
7	SUMATERA SELATAN	5.879	722	-	472	-	555	-	501	-	478	-	492	-
8	BANGKA BELITUNG	2.985	251	-	164	-	193	-	174	-	166	-	171	-
9	LAMPUNG	17.961	2.206	-	1.441	-	1.696	-	1.530	-	1.462	-	1.504	-
10	KEP. RIAU	9	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
11	DKI. JAKARTA	10	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
12	BANTEN	1.500	184	-	120	-	142	-	128	-	122	-	126	-
13	JAWA BARAT	67.900	8.255	-	5.392	-	6.345	-	5.726	-	5.470	-	5.627	-
14	D.I. YOGYAKARTA	9.715	1.171	-	765	-	900	-	812	-	776	-	798	-
15	JAWA TENGAH	217.010	25.743	-	16.815	-	19.787	-	17.857	-	17.057	-	17.549	-
16	JAWA TIMUR	503.995	58.243	-	38.043	-	44.768	-	40.401	-	38.591	-	39.704	-
17	B A L I	6.280	771	-	504	-	593	-	535	-	511	-	526	-
18	KALIMANTAN BARAT	3.580	440	-	287	-	338	-	305	-	291	-	300	-
19	KALIMANTAN TENGAH	1.440	177	-	116	-	136	-	123	-	117	-	121	-
20	KALIMANTAN SELATAN	1.530	188	-	123	-	144	-	130	-	125	-	128	-
21	KALIMANTAN TIMUR	2.410	296	-	193	-	228	-	205	-	196	-	202	-
22	KALIMANTAN UTARA	105	13	-	8	-	10	-	9	-	9	-	9	-
23	SULAWESI UTARA	505	62	-	41	-	48	-	43	-	41	-	42	-
24	GORONTALO	625	77	-	50	-	59	-	53	-	51	-	52	-
25	SULAWESI TENGAH	8.605	1.057	-	690	-	812	-	733	-	700	-	720	-
26	SULAWESI TENGGARA	3.960	486	-	318	-	374	-	337	-	322	-	332	-
27	SULAWESI SELATAN	67.275	7.394	-	4.829	-	5.683	-	5.129	-	4.899	-	5.040	-
28	SULAWESI BARAT	7.010	830	-	542	-	638	-	576	-	550	-	566	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	14.695	1.758	-	1.148	-	1.351	-	1.219	-	1.165	-	1.198	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2.920	359	-	234	-	276	-	249	-	238	-	244	-
31	MALUKU	146	18	-	12	-	14	-	12	-	12	-	12	-
32	PAPUA	540	66	-	43	-	51	-	46	-	44	-	45	-
33	MALUKU UTARA	270	33	-	22	-	25	-	23	-	22	-	23	-
34	PAPUA BARAT	150	18	-	12	-	14	-	13	-	12	-	13	-
JUMLAH		1.050.000	122.816	-	80.223	-	94.405	-	85.194	-	81.378	-	83.724	-
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN			122.816		80.223		94.405		85.194		81.378		83.724	

Lampiran II.3 Peraturan Menteri Pertanian
 Nomor : 04/Permentan/SR.310/3/2017
 Tanggal : 3 Maret 2017

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES	
		ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	522	-	707	335	731	159	716	302	1.093	333	1.059	364
2	SUMATERA UTARA	2.410	-	3.267	57	3.377	27	3.309	52	5.051	57	4.891	63
3	SUMATERA BARAT	762	-	1.032	-	1.067	-	1.046	-	1.596	-	1.548	-
4	J A M B I	378	-	513	-	530	-	519	-	793	-	767	-
5	R I A U	479	-	649	348	671	165	657	314	1.003	346	973	379
6	BENGKULU	223	-	303	-	313	-	306	-	468	-	454	-
7	SUMATERA SELATAN	287	-	389	-	403	-	394	-	602	-	584	-
8	BANGKA BELITUNG	100	-	135	211	140	100	137	190	209	210	204	230
9	LAMPUNG	878	-	1.190	-	1.230	-	1.205	-	1.839	-	1.780	-
10	KEP. RIAU	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
12	BANTEN	73	-	99	-	103	-	101	-	154	-	148	-
13	JAWA BARAT	3.284	-	4.452	154	4.602	73	4.510	139	6.884	153	6.667	167
14	D.I. YOGYAKARTA	466	-	631	41	653	19	640	37	976	41	944	45
15	JAWA TENGAH	10.241	-	13.883	1.662	14.351	788	14.065	1.498	21.466	1.653	20.789	1.806
16	JAWA TIMUR	23.171	-	31.410	6.682	32.468	3.168	31.821	6.022	48.567	6.643	47.036	7.257
17	B A L I	307	-	416	-	430	-	421	-	643	-	623	-
18	KALIMANTAN BARAT	175	-	237	-	245	-	240	-	367	-	355	-
19	KALIMANTAN TENGAH	70	-	95	-	99	-	97	-	147	-	142	-
20	KALIMANTAN SELATAN	75	-	101	-	105	-	103	-	157	-	151	-
21	KALIMANTAN TIMUR	118	-	160	-	165	-	162	-	247	-	238	-
22	KALIMANTAN UTARA	5	-	7	-	7	-	7	-	11	-	10	-
23	SULAWESI UTARA	25	-	33	-	35	-	34	-	52	-	49	-
24	GORONTALO	31	-	41	-	43	-	42	-	64	-	62	-
25	SULAWESI TENGAH	420	-	570	-	589	-	577	-	881	-	856	-
26	SULAWESI TENGGARA	193	-	262	-	271	-	266	-	406	-	393	-
27	SULAWESI SELATAN	2.941	-	3.987	1.588	4.122	753	4.039	1.431	6.165	1.579	5.972	1.724
28	SULAWESI BARAT	330	-	448	56	463	27	454	51	692	56	671	60
29	NUSA TENGGARA BARAT	699	-	948	86	980	41	960	78	1.466	86	1.418	94
30	NUSA TENGGARA TIMUR	143	-	193	-	200	-	196	-	299	-	289	-
31	MALUKU	7	-	10	-	10	-	10	-	15	-	14	-
32	PAPUA	26	-	36	-	37	-	36	-	55	-	55	-
33	MALUKU UTARA	13	-	18	-	18	-	18	-	28	-	27	-
34	PAPUA BARAT	7	-	10	-	10	-	10	-	15	-	16	-
JUMLAH		48.859	-	66.232	11.220	68.470	5.320	67.100	10.114	102.413	11.157	99.186	12.189
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN		48.859	-	77.452	-	73.790	-	77.214	-	113.570	-	111.375	-

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN	
			ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	48.470	4.658	-	3.417	-	4.151	-	4.196	-	3.925	-	3.368	-
2	SUMATERA UTARA	123.810	12.226	-	8.968	-	10.894	-	11.015	-	10.303	-	8.840	-
3	SUMATERA BARAT	60.000	5.565	-	4.082	-	4.959	-	5.014	-	4.690	-	4.024	-
4	J A M B I	48.720	4.603	-	3.376	-	4.101	-	4.147	-	3.879	-	3.328	-
5	R I A U	47.820	4.791	-	3.514	-	4.269	-	4.316	-	4.037	-	3.464	-
6	BENGKULU	29.310	3.164	-	2.321	-	2.820	-	2.851	-	2.667	-	2.288	-
7	SUMATERA SELATAN	94.230	9.670	-	7.093	-	8.617	-	8.712	-	8.149	-	6.992	-
8	BANGKA BELITUNG	18.100	1.859	-	1.363	-	1.656	-	1.675	-	1.566	-	1.344	-
9	LAMPUNG	160.120	14.328	-	10.510	-	12.767	-	12.908	-	12.074	-	10.360	-
10	KEP. RIAU	240	13,00	-	10,00	-	12,00	-	12,00	-	11,00	-	10,00	-
11	DKI. JAKARTA	55	7,00	-	4,00	-	5,00	-	6,00	-	5,00	-	4,00	-
12	BANTEN	28.000	2.534	-	1.859	-	2.258	-	2.283	-	2.135	-	1.832	-
13	JAWA BARAT	344.400	30.914	-	22.676	-	27.546	-	27.850	-	26.051	-	22.352	-
14	D.I. YOGYAKARTA	24.480	2.379	-	1.745	-	2.120	-	2.143	-	2.005	-	1.720	-
15	JAWA TENGAH	404.800	40.352	-	29.599	-	35.956	-	36.353	-	34.004	-	29.176	-
16	JAWA TIMUR	597.305	57.822	-	42.414	-	51.523	-	52.092	-	48.726	-	41.808	-
17	B A L I	23.350	2.257	-	1.656	-	2.011	-	2.033	-	1.902	-	1.632	-
18	KALIMANTAN BARAT	88.500	8.165	-	5.990	-	7.276	-	7.356	-	6.881	-	5.904	-
19	KALIMANTAN TENGAH	36.960	3.231	-	2.370	-	2.879	-	2.911	-	2.723	-	2.336	-
20	KALIMANTAN SELATAN	37.145	3.740	-	2.743	-	3.332	-	3.369	-	3.151	-	2.704	-
21	KALIMANTAN TIMUR	26.920	2.744	-	2.013	-	2.445	-	2.472	-	2.312	-	1.984	-
22	KALIMANTAN UTARA	2.410	230	-	169	-	205	-	207	-	194	-	166	-
23	SULAWESI UTARA	12.035	1.261	-	925	-	1.124	-	1.136	-	1.063	-	912	-
24	GORONTALO	21.080	1.660	-	1.217	-	1.479	-	1.495	-	1.399	-	1.200	-
25	SULAWESI TENGAH	28.500	2.888	-	2.118	-	2.575	-	2.602	-	2.434	-	2.088	-
26	SULAWESI TENGGARA	18.590	1.472	-	1.079	-	1.311	-	1.326	-	1.240	-	1.064	-
27	SULAWESI SELATAN	129.780	10.277	-	7.538	-	9.157	-	9.258	-	8.660	-	7.430	-
28	SULAWESI BARAT	23.310	1.754	-	1.286	-	1.563	-	1.580	-	1.478	-	1.268	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	45.890	4.276	-	3.137	-	3.811	-	3.853	-	3.604	-	3.092	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	13.870	1.505	-	1.104	-	1.341	-	1.356	-	1.268	-	1.088	-
31	MALUKU	2.400	266	-	195	-	237	-	239	-	224	-	192	-
32	PAPUA	6.000	664	-	487	-	592	-	598	-	559	-	480	-
33	MALUKU UTARA	1.500	166	-	122	-	148	-	150	-	140	-	120	-
34	PAPUA BARAT	1.900	210	-	154	-	187	-	189	-	177	-	152	-
JUMLAH		2.550.000	241.651	-	177.254	-	215.327	-	217.703	-	203.636	-	174.722	-
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN			241.651		177.254		215.327		217.703		203.636		174.722	

Lampiran II.4 Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 04/Permentan/SR.310/3/2017

Tanggal : 3 Maret 2017

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES	
		ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	2.130	-	2.532	1.334	2.665	799	2.667	1.308	4.226	1.483	4.165	1.446
2	SUMATERA UTARA	5.590	-	6.646	2.788	6.994	1.669	6.999	2.733	11.091	3.098	10.934	3.022
3	SUMATERA BARAT	2.545	-	3.025	2.032	3.184	1.216	3.186	1.992	5.049	2.258	4.977	2.202
4	J A M B I	2.105	-	2.502	1.492	2.633	893	2.635	1.462	4.175	1.657	4.116	1.616
5	R I A U	2.191	-	2.604	947	2.741	567	2.743	928	4.346	1.052	4.284	1.026
6	BENGKULU	1.447	-	1.720	149	1.810	89	1.812	146	2.871	165	2.829	161
7	SUMATERA SELATAN	4.422	-	5.257	1.431	5.532	856	5.536	1.403	8.772	1.590	8.648	1.550
8	BANGKA BELITUNG	850	-	1.010	272	1.063	163	1.064	267	1.686	303	1.664	295
9	LAMPUNG	6.552	-	7.789	6.414	8.197	3.840	8.203	6.288	12.998	7.127	12.814	6.951
10	KEP. RIAU	6	-	7	25	8	15	8	25	12	28	11	27
11	DKI. JAKARTA	3	-	3	-	3	-	3	-	7	-	5	-
12	BANTEN	1.159	-	1.377	1.068	1.449	640	1.451	1.047	2.299	1.187	2.264	1.158
13	JAWA BARAT	14.135	-	16.805	13.617	17.685	8.151	17.698	13.348	28.044	15.129	27.644	14.755
14	D.I. YOGYAKARTA	1.088	-	1.293	624	1.361	374	1.362	612	2.158	694	2.126	676
15	JAWA TENGAH	18.451	-	21.936	8.400	23.084	5.028	23.101	8.235	36.606	9.333	36.082	9.104
16	JAWA TIMUR	26.439	-	31.433	15.650	33.079	9.368	33.103	15.341	52.454	17.387	51.707	16.959
17	B A L I	1.032	-	1.227	618	1.291	370	1.292	606	2.048	687	2.019	669
18	KALIMANTAN BARAT	3.734	-	4.439	3.079	4.671	1.843	4.675	3.019	7.407	3.421	7.302	3.338
19	KALIMANTAN TENGAH	1.477	-	1.756	1.626	1.848	973	1.850	1.594	2.931	1.806	2.888	1.761
20	KALIMANTAN SELATAN	1.710	-	2.033	701	2.139	419	2.141	687	3.393	779	3.345	759
21	KALIMANTAN TIMUR	1.255	-	1.492	444	1.570	266	1.571	435	2.489	493	2.453	482
22	KALIMANTAN UTARA	105	-	125	70	131	42	132	68	208	78	205	75
23	SULAWESI UTARA	577	-	686	133	722	80	722	130	1.144	148	1.128	144
24	GORONTALO	759	-	902	1.274	949	762	950	1.249	1.506	1.415	1.484	1.380
25	SULAWESI TENGAH	1.320	-	1.570	503	1.652	301	1.653	493	2.620	559	2.580	544
26	SULAWESI TENGGARA	673	-	800	1.108	842	663	842	1.086	1.335	1.231	1.316	1.202
27	SULAWESI SELATAN	4.699	-	5.586	7.730	5.879	4.627	5.883	7.578	9.323	8.588	9.190	8.377
28	SULAWESI BARAT	802	-	953	1.563	1.003	935	1.004	1.532	1.591	1.736	1.568	1.694
29	NUSA TENGGARA BARAT	1.955	-	2.325	1.517	2.446	908	2.448	1.487	3.879	1.685	3.824	1.643
30	NUSA TENGGARA TIMUR	688	-	818	57	861	34	861	55	1.365	63	1.345	61
31	MALUKU	121	-	144	-	152	-	152	-	241	-	237	-
32	PAPUA	304	-	361	-	380	-	380	-	602	-	593	-
33	MALUKU UTARA	76	-	90	-	95	-	95	-	151	-	147	-
34	PAPUA BARAT	96	-	114	-	120	-	120	-	191	-	190	-
JUMLAH		110.496	-	131.360	76.666	138.239	45.891	138.342	75.154	219.218	85.180	216.084	83.077
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN		110.496	-	208.026	-	184.130	-	213.496	-	304.398	-	299.161	-

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN	
			ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	14.200	1.181	-	955	-	1.517	-	1.489	-	1.330	-	1.116	-
2	SUMATERA UTARA	29.350	2.442	-	1.973	-	3.136	-	3.077	-	2.749	-	2.307	-
3	SUMATERA BARAT	14.820	1.233	-	996	-	1.583	-	1.554	-	1.388	-	1.165	-
4	J A M B I	6.153	483	-	391	-	621	-	609	-	544	-	457	-
5	R I A U	8.000	666	-	538	-	855	-	839	-	749	-	629	-
6	BENGKULU	5.450	399	-	323	-	513	-	503	-	450	-	377	-
7	SUMATERA SELATAN	15.280	1.271	-	1.027	-	1.633	-	1.602	-	1.431	-	1.201	-
8	BANGKA BELITUNG	5.940	402	-	325	-	516	-	506	-	452	-	380	-
9	LAMPUNG	26.400	2.196	-	1.775	-	2.821	-	2.768	-	2.473	-	2.076	-
10	KEP. RIAU	34	2,00	-	1,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	3,00	-
11	DKI. JAKARTA	100	8,00	-	7,00	-	11,00	-	10,00	-	9,00	-	8,00	-
12	BANTEN	6.800	566	-	457	-	727	-	713	-	637	-	535	-
13	JAWA BARAT	49.000	4.077	-	3.294	-	5.235	-	5.137	-	4.590	-	3.852	-
14	D.I. YOGYAKARTA	12.400	1.032	-	834	-	1.325	-	1.300	-	1.162	-	975	-
15	JAWA TENGAH	237.860	19.790	-	15.991	-	25.413	-	24.935	-	22.282	-	18.700	-
16	JAWA TIMUR	458.030	29.622	-	23.936	-	38.040	-	37.324	-	33.352	-	27.992	-
17	B A L I	21.100	1.756	-	1.419	-	2.254	-	2.212	-	1.977	-	1.659	-
18	KALIMANTAN BARAT	19.690	1.638	-	1.324	-	2.104	-	2.064	-	1.844	-	1.548	-
19	KALIMANTAN TENGAH	2.850	237	-	192	-	304	-	299	-	267	-	224	-
20	KALIMANTAN SELATAN	5.450	453	-	366	-	582	-	571	-	511	-	428	-
21	KALIMANTAN TIMUR	1.470	122	-	99	-	157	-	154	-	138	-	116	-
22	KALIMANTAN UTARA	388	32	-	26	-	41	-	41	-	36	-	31	-
23	SULAWESI UTARA	1.650	137	-	111	-	176	-	173	-	155	-	130	-
24	GORONTALO	960	80	-	65	-	103	-	101	-	90	-	75	-
25	SULAWESI TENGAH	4.630	385	-	311	-	495	-	485	-	434	-	364	-
26	SULAWESI TENGGARA	5.605	416	-	336	-	534	-	524	-	468	-	393	-
27	SULAWESI SELATAN	24.170	2.011	-	1.625	-	2.582	-	2.534	-	2.264	-	1.900	-
28	SULAWESI BARAT	1.180	98	-	79	-	126	-	124	-	111	-	93	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	12.220	1.017	-	822	-	1.306	-	1.281	-	1.145	-	961	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	5.380	448	-	362	-	575	-	564	-	504	-	423	-
31	MALUKU	550	46	-	37	-	59	-	58	-	52	-	43	-
32	PAPUA	1.990	166	-	134	-	213	-	209	-	186	-	156	-
33	MALUKU UTARA	720	60	-	48	-	77	-	75	-	67	-	57	-
34	PAPUA BARAT	180	15	-	12	-	19	-	19	-	17	-	14	-
JUMLAH		1.000.000	74.487	-	60.191	-	95.655	-	93.856	-	83.866	-	70.388	-
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN			74.487		60.191		95.655		93.856		83.866		70.388	

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PROPINSI	JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES	
		ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN	ALOKASI	CADANGAN
1	ACEH	694	-	968	-	1.032	-	1.029	-	1.508	-	1.381	-
2	SUMATERA UTARA	1.434	-	2.001	-	2.133	-	2.128	-	3.116	-	2.854	-
3	SUMATERA BARAT	724	-	1.010	-	1.077	-	1.074	-	1.573	-	1.443	-
4	J A M B I	284	-	396	68	422	36	421	78	617	84	565	77
5	R I A U	391	-	545	-	581	-	580	-	849	-	778	-
6	BENGKULU	234	-	327	128	349	69	348	148	510	159	467	146
7	SUMATERA SELATAN	746	-	1.042	-	1.111	-	1.108	-	1.622	-	1.486	-
8	BANGKA BELITUNG	236	-	329	219	351	117	350	252	513	272	470	250
9	LAMPUNG	1.289	-	1.800	-	1.919	-	1.914	-	2.803	-	2.566	-
10	KEP. RIAU	1	-	1	3	1	1	1	3	2	4	2	3
11	DKI. JAKARTA	5	-	7	-	7	-	7	-	11	-	10	-
12	BANTEN	332	-	464	-	494	-	493	-	722	-	660	-
13	JAWA BARAT	2.393	-	3.340	-	3.562	-	3.552	-	5.202	-	4.766	-
14	D.I. YOGYAKARTA	606	-	845	-	901	-	899	-	1.316	-	1.205	-
15	JAWA TENGAH	11.617	-	16.214	-	17.289	-	17.244	-	25.253	-	23.132	-
16	JAWA TIMUR	17.390	-	24.271	20.158	25.879	10.751	25.812	23.151	37.800	25.023	34.622	22.907
17	B A L I	1.031	-	1.438	-	1.534	-	1.530	-	2.240	-	2.050	-
18	KALIMANTAN BARAT	962	-	1.342	-	1.431	-	1.427	-	2.090	-	1.916	-
19	KALIMANTAN TENGAH	139	-	194	-	207	-	207	-	303	-	277	-
20	KALIMANTAN SELATAN	266	-	372	-	396	-	395	-	579	-	531	-
21	KALIMANTAN TIMUR	72	-	100	-	107	-	107	-	156	-	142	-
22	KALIMANTAN UTARA	19	-	26	-	28	-	28	-	41	-	39	-
23	SULAWESI UTARA	81	-	112	-	120	-	120	-	175	-	160	-
24	GORONTALO	47	-	65	-	70	-	70	-	102	-	92	-
25	SULAWESI TENGAH	226	-	316	-	337	-	336	-	492	-	449	-
26	SULAWESI TENGGARA	244	-	341	120	363	64	362	137	531	148	488	136
27	SULAWESI SELATAN	1.181	-	1.648	-	1.757	-	1.752	-	2.566	-	2.350	-
28	SULAWESI BARAT	58	-	80	-	86	-	86	-	125	-	114	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	597	-	833	-	888	-	886	-	1.297	-	1.187	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	263	-	367	-	391	-	390	-	571	-	522	-
31	MALUKU	27	-	37	-	40	-	40	-	58	-	53	-
32	PAPUA	97	-	136	-	145	-	144	-	211	-	193	-
33	MALUKU UTARA	35	-	49	-	52	-	52	-	76	-	72	-
34	PAPUA BARAT	9	-	12	-	13	-	13	-	19	-	18	-
JUMLAH		43.730	-	61.028	20.696	65.073	11.038	64.905	23.769	95.049	25.690	87.060	23.519
JUMLAH ALOKASI + CADANGAN		43.730		81.724		76.111		88.674		120.739		110.579	